



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF DJATMIKO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **212677**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.275.000.000

1. Tanah Seluas 913 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.500.000

1. MOTOR, HONDA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 133.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 220.256.999

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.763.306.999

III. HUTANG Rp. 235.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.528.306.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.